

ABSTRAK

Annisa Fajri Rahmatiyah 210211040097 : “Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, Pembimbing II: Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2025)

Kata kunci: Donasi Digital, Penerjemah Ilegal, Hak Cipta, Hukum Ekonomi Syariah, *Maqāṣid Syarī’ah*

Penelitian ini menganalisis praktik donasi digital kepada penerjemah komik ilegal dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana praktik tersebut berhadapan dengan regulasi yang ada, serta mengevaluasi keabsahannya berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dan dampaknya menurut maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE, dan Fatwa DSN-MUI, serta literatur hukum dan fikih yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik donasi digital kepada penerjemah ilegal melanggar hukum positif, karena secara substansial memenuhi unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang serta Syarat Pengguna Webtoon. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad donasi ini dinilai tidak sah karena tujuan utamanya adalah untuk mendukung perbuatan yang haram (pelanggaran hak cipta), serta mengandung unsur-unsur *gharār*, *tadlīs*, dan *zulm*.

Implikasi dari penelitian ini sangat signifikan. Pertama, praktik ini merusak ekosistem industri kreatif yang sah, merugikan pencipta dan penerbit, serta menghambat inovasi. Kedua, dari sisi syariah, praktik ini secara fundamental bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid syarī’ah*), khususnya dalam hal melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan penegakan hukum, pengetatan kebijakan platform digital, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendorong budaya konsumsi konten yang legal dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

Annisa Fajri Rahmatiyah 210211040097 : “Analysis Of Donation Practice to Illegal Translator In The Perspective of Positive Law And Syariah Economic Law”. Supervisor I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum Supervisor II: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H at the postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin (2025)

Kata kunci: Digital Donation, Illegal Translator, Copyright, Islamic Economic Law, *Maqāṣid Syarī’ah*

This study analyzes the practice of digital donations to illegal comic translators from the perspective of Indonesian positive law and Islamic economic law. The primary objective is to identify how this practice aligns with existing regulations and to evaluate its legitimacy based on the principles of muamalah (transactions) and its impact according to the maqashid sharia (the principles of Islamic law). This study employs normative legal methods with a statutory and conceptual approach, focusing on an in-depth analysis of primary legal materials, such as the Copyright Law, the Electronic Information and Transactions Law, the DSN-MUI Fatwa, and relevant legal and fiqh literature.

The results indicate that the practice of digital donations to illegal translators violates positive law, as it substantially fulfills the elements of a violation under the Copyright Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Law on the Collection of Money or Goods, and the Webtoon User Terms. From the perspective of Islamic economic law, this donation contract is deemed invalid because its primary purpose is to support a forbidden act (copyright infringement), and it contains elements of *gharār*, *tadlīs*, and *ẓulm*.

The implications of this research are significant. First, this practice undermines the legitimate creative industry ecosystem, harms creators and publishers, and stifles innovation. Second, from a sharia perspective, this practice fundamentally contradicts the objectives of sharia (*maqāṣid sharia*), particularly in protecting property (*ḥifẓ al-māl*), reason (*ḥifẓ al-‘aql*), and religion (*ḥifẓ al-dīn*). This study recommends strengthening law enforcement, tightening digital platform policies, and raising public awareness to encourage a culture of legal and responsible content consumption.